

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DENPASAR

MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2019-2023

Volume 9, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DENPASAR**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DENPASAR

MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2019-2023

Volume 9, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DENPASAR**

Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Menurut Pengeluaran 2019-2023

Volume 9, 2024

Katalog: 9302020.5171

Nomor Publikasi: 51710.2305

Ukuran Buku: 14,8 cm X 21 cm

Jumlah Halaman: xiv + 74 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Penerbit:

© **Badan Pusat Statistik Kota Denpasar**

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Denpasar.

Tim Penyusun

Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar

Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023

Volume 9, 2024

Pengarah

Dr. Andri Yudhi Supriadi, SE., ME.

Penanggung Jawab

Titis Krisnawati, SST, M.Si.

Penyunting

Gede Iwan Santika, SST.
Titis Krisnawati, SST, M.Si.

Pengolah Data

Roni Anom Satrio, S.Tr.Stat.

Penulis Naskah

Roni Anom Satrio, S.Tr.Stat.

Penata Letak

Roni Anom Satrio, S.Tr.Stat.

Kata Pengantar



Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, dan Net Ekspor Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts*. 2008 seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Disadari bahwa penyajian publikasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Kendati demikian, selalu diupayakan adanya penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan. Untuk itu, kritik dan saran dari pengguna dan pemakai data sangat diharapkan dalam penyempurnaan publikasi sejenis di masa yang akan datang. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah memberi kontribusi hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Denpasar, April 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Denpasar,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andri Yudhi Supriadi' with a stylized flourish at the end.

Dr. Andri Yudhi Supriadi, SE., ME.

Daftar Isi

	Hal.
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xiii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ...	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB	7
Bab 4 Metode Estimasi dan Sumber Data	13
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	15
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	17
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	19
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	22
2.5 Perubahan Inventori	25
2.6 Ekspor-Impor	28
Bab 3 Tinjauan Ekonomi Kota Denpasar	31
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	33
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	43
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga	43
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT	48
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	49
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	53
3.2.5 Perubahan Inventori	54
3.2.6 Net Ekspor Antar Daerah	55

	Hal.
Bab 4 Perkembangan Agregat PDRB Kota Denpasar Menurut Pengeluaran	59
4.1 PDRB Nominal	61
4.2 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PDRB	63
4.3 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PTMB	64
4.4 <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	65
Lampiran	67

<https://denpasarkota.bps.go.id>

Daftar Tabel

Tabel	Hal.
1.1 Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	11
2.1 Deflator Menurut Jenis Belanja	22
3.1 PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2019-2023	35
3.2 PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2019-2023	36
3.3 Distribusi PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2019-2023	39
3.4 Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2019-2023	41
3.5 Indeks Implisit PDRB Kota Denpasar Menurut Pengeluaran, 2019-2023	42
3.6 Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Kota Denpasar Menurut Pengeluaran (Persen), 2019-2023	42
3.7 Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Denpasar, 2019-2023	45
3.8 Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Denpasar (Persen), 2019-2023	46
3.9 Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Denpasar (Persen), 2019-2023	47
3.10 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir LNPRT Kota Denpasar (Miliar Rupiah), 2019-2023	48
3.11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Denpasar, 2019-2023	50
3.12 Perkembangan PMTB Kota Denpasar, 2019-2023	53
3.13 Perkembangan Perubahan Inventori Kota Denpasar, 2019-2023	55

Tabel	Hal.
3.14 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Denpasar, 2019-2023	57
4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Denpasar, 2019-2023	62
4.2 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Denpasar, 2019-2023	63
4.3 Rasio Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB Kota Denpasar, 2019-2023	65
4.4 <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> Kota Denpasar, 2019-2023	66

<https://denpasarkota.bps.go.id>

Daftar Gambar

Gambar	Hal.
3.1 PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah), 2019-2023	34
3.2 PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah), 2019-2023 ..	37
3.3 Perbandingan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah), 2019-2023	38
3.4 Distribusi PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2023	40
3.5 Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2019-2023	41

Daftar Lampiran

Lampiran	Hal.
1 Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2019-2023	69
2 Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2019-2023	70
3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2019-2023	71
4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2019-2023	72
5 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar (2010=100) Menurut Pengeluaran, 2019-2023	73
6 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar (2010=100) Menurut Pengeluaran (Persen), 2019-2023 ...	74



Pendahuluan

1 Pendahuluan

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, disamping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*framework*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB yang dihitung dengan menggunakan pendekatan lapangan usaha (*production*). Meskipun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹⁾. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas

1) Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak

pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep²⁾ penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberikan manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (output) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk permintaan akhir. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta Ekspor-Impor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir

tidak langsung dikurangi subsidi)

2) *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods*

masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan cara pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak memperlmasalahkannya adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana pendapatan (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³⁾, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir. Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai output akhir (*final output*). Mengaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik

3) - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik

- Disebut sebagai pendekatan riil
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan untuk memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sebagai berikut :

$$Y = C + GFCF + \Delta\text{Inventori} + X - M$$

Dimana:

Y (*Income*) = PDRB Produksi atau Pendapatan

C (*Consumption*) = Konsumsi Akhir

$GFCF$ (*Gross Fixed Capital Formation*) = PMTB

$\Delta\text{Inventori}$ = Perubahan Inventori

X = Ekspor

M = Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan identik dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan $GFCF$ serta $\Delta\text{Inventori}$ merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai Net Ekspor.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat mengenai perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran

konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Salah satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan

penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan, dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena perekonomian suatu wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar karena beberapa alasan

berikut:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi, dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi, serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh: nilai tegakan padi, kelapa sawit, dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai

bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.

- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/ RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya untuk eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan basis data, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan

evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metode Estimasi

Output jasa intermediasi keuangan diestimasi dengan metode FISIM (*Financial Intermediation Services Indirectly Measured*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan metode *Imputed Bank Services Charge* (IBSC).

- Valuasi

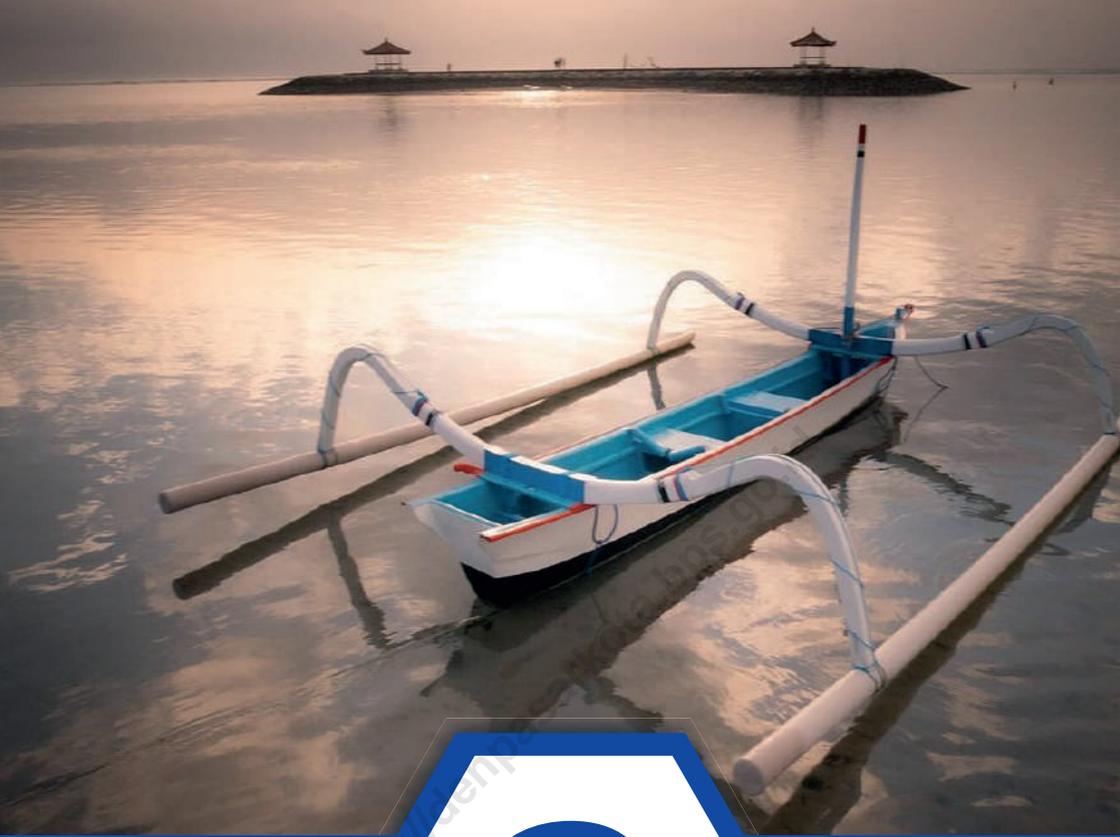
Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*basic price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification* (ISIC Rev. 4) dan *Central Product Classification* (CPC Rev. 2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Tabel 1.1 Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000		PDRB Tahun Dasar 2010	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga		1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah		2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto		3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	
4. Perubahan Inventori		4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	
5. Ekspor		5. Perubahan Inventori	
6. Impor		6. Ekspor	
		7. Impor	



2

Metode Estimasi & Sumber Data

2

Metode Estimasi & Sumber Data

2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)

A. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

B. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

C. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose* (COICOP), sebagai berikut:

- a. Makanan dan minuman tidak beralkohol

- b. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
- c. Pakaian dan alas kaki
- d. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
- e. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
- f. Kesehatan
- g. Angkutan
- h. Komunikasi
- i. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
- j. Pendidikan
- k. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
- l. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

- a. Makanan, Minuman, dan Rokok
- b. Pakaian dan Alas Kaki
- c. Perumahan, Perkakas, Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
- d. Kesehatan dan Pendidikan
- e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
- f. Hotel dan Restoran
- g. Lainnya

D. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS
- b. Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan (SERUTI), BPS
- c. Sensus Penduduk 2020, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS
- e. Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)

E. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metode berikut:

- a. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
- b. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PK-RT Tahunan)
- c. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
- d. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
- e. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga Berlaku (ADHB);
- f. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
- g. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

A. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

B. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha.

LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

C. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus, dan tunjangan lain.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dll.

D. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga Tahunan (SK-LNP), BPS
- b. Survei Khusus LNPRT Triwulanan (SK-LNPRT), BPS

- c. Hasil *updating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

E. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode berikut:

- a. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
- b. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
- c. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
- d. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (ADHB);
- e. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/ Kota terdekat);
- f. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan 2010 (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan:

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPRT.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)

A. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit

pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

B. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

- a. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktiknya, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

C. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. PK-P kabupaten/kota mencakup:

- a. PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota
- b. PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan
- c. PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota

D. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan, dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan, dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

E. Metode Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

$$\text{PK-P atas dasar harga berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan.
2. PK-P atas dasar harga konstan 2010 diestimasi dengan cara mendeflate PK-P atas dasar harga berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Tabel 2.1 Deflator Menurut Jenis Belanja

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB Umum Tanpa Ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB Umum Tanpa Ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan Barang dan Jasa	IHK Umum	Provinsi atau Kabupaten/Kota Terdekat
<i>Social Transfer in Kind</i>	IHK Umum	Provinsi atau Kabupaten/Kota Terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

A. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan

Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

B. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer, dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*cultivated biological resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah bruto mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*consumption of fixed capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

C. Cakupan

PMTB mencakup :

- a. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang

dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);

- b. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir/erosi.

D. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan nonmigas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian

E. Metode Estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung maupun metode tidak langsung tergantung ketersediaan data pada masing-masing daerah.

- a. Metode Langsung

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor +

TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan 2010 diperoleh dengan cara men-deflate PMTB atas dasar harga berlaku dengan IHPB berikut:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

b. Metode Tidak Langsung

Pendekatan Supply = PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi = PMTB atas dasar harga Konstan 2010 (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 Perubahan Inventori (PI)

A. Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang investasi.

B. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian

tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku maupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

C. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku dan penolong (material dan supplies), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk

- tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
 - g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
 - h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

- a. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- b. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS;
- c. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
- d. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
- e. Data komoditas perkebunan;
- f. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- g. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
- h. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan Data ternak, Ditjennak Kementan.

E. Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau metode deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

- a. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan pertambangan.

PI atas dasar harga berlaku = Volume inventori (t) - Volume inventori (t-1) x Harga per unit PI atas dasar harga Konstan

2010 = PI atas dasar harga berlaku/IHPB

b. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga konstan 2010 = Inventori (t) atas dasar harga berlaku/IHPB(t) - Inventori(t-1) atas dasar harga berlaku/IHPB(t-1)

PI atas dasar harga berlaku = PI atas dasar harga Konstan 2010 x IHPB rata-rata(t)

2.6 Ekspor-Import

A. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-import dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhinya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-import dari dan ke suatu wilayah.

B. Konsep dan definisi

Ekspor-import didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian ataupun hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan nonresiden (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

C. Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara nilai ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

D. Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metode tidak langsung.



3

Tinjauan Perekonomian Kota Denpasar

3

Tinjauan Perekonomian Kota Denpasar

3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran

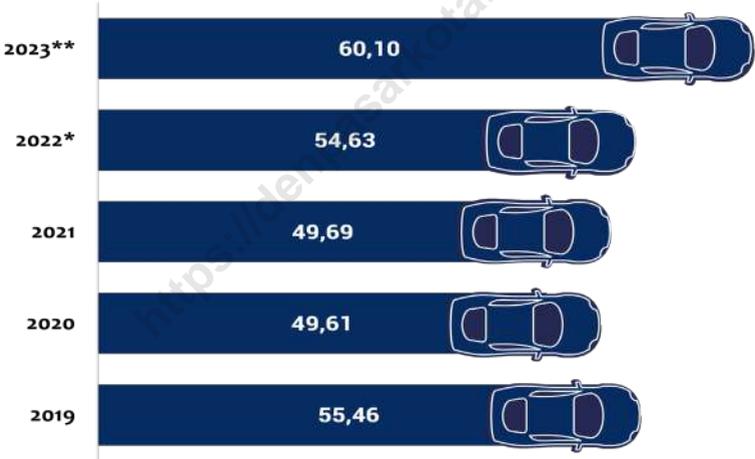
Sejak tahun 2015, PDRB dihitung dengan menggunakan tahun dasar baru yaitu tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (SNA) yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu akan berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDRB tersebut.

PDRB Kota Denpasar atas dasar harga konstan meningkat dari 34,07 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 36,00 triliun rupiah pada tahun 2023. Perekonomian Kota Denpasar menunjukkan kinerja positif dengan tumbuh kuat dan stabil sebesar 5,69 persen. Pertumbuhan positif ini melanjutkan keberhasilan Kota Denpasar pada tahun 2022 yang tumbuh 5,02 persen pasca pandemi. Kenaikan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencapai 17,28 persen. Sementara dari sisi permintaan akhir, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Komponen pengeluaran sebagai penopang perekonomian Kota Denpasar tersebut tercatat tumbuh 6,25 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2022 yang mencapai 4,47 persen.

PDRB Kota Denpasar atas dasar harga berlaku juga mengalami peningkatan. PDRB terus mengalami peningkatan sejak turun pada tahun 2020 akibat pandemi. Dalam lima tahun terakhir, berikut angka

PDRB Kota Denpasar: 55,46 triliun rupiah (2019), 49,61 triliun rupiah (2020), 49,69 triliun rupiah (2021), 54,63 triliun rupiah (2022), dan 60,10 triliun rupiah (2023). Hal ini menunjukkan sumber daya ekonomi Kota Denpasar pada tahun 2023 telah melampaui kondisi sebelum pandemi atau tahun 2019. Peningkatan maupun penurunan tersebut dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB dari sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB menurut pengeluaran.

Gambar 3.1 PDRB Kota Denpasar ADHB Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah), 2019-2023



Sumber: BPS Kota Denpasar
) Angka Sementara
) Angka Sangat Sementara

**Tabel 3.1 PDRB Kota Denpasar ADHB
Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	25.855,85	25.212,94	25.581,39	27.947,56	30.704,58
Konsumsi LNPRT	814,21	795,30	821,09	955,06	1.135,02
Konsumsi Pemerintah	7.864,04	8.396,25	8.036,77	8.102,76	8.340,08
PMTB	19.017,84	16.037,90	16.412,76	17.789,85	19.066,39
Perubahan Inventori	129,73	92,43	103,97	114,64	40,10
Net Ekspor	1.774,38	-927,35	-1.269,36	-276,03	814,13
PDRB	55.456,04	49.607,46	49.686,63	54.633,83	60.100,30

Sumber: BPS Kota Denpasar

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dinilai dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil.

**Tabel 3.2 PDRB Kota Denpasar ADHK
Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	18.014,62	17.116,89	17.129,52	17.895,09	19.013,64
Konsumsi LNPRT	512,97	498,31	508,53	564,18	647,26
Konsumsi Pemerintah	4.584,81	4.793,23	4.649,01	4.571,48	4.554,81
PMTB	13.693,56	11.415,16	11.283,95	11.584,84	11.999,41
Perubahan Inventori	51,03	43,25	55,94	59,73	20,48
Net Ekspor	-702,56	-1.126,61	-1.187,34	-608,60	-231,30
PDRB	36.154,42	32.740,22	32.439,61	34.066,71	36.004,30

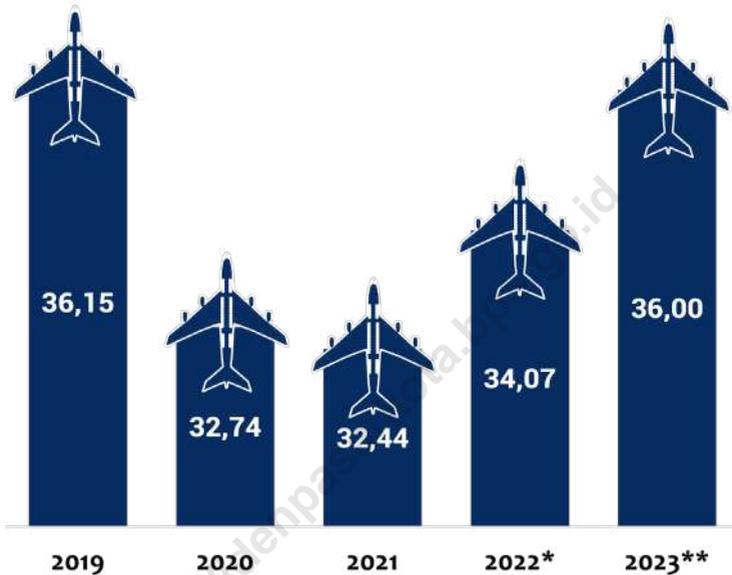
Sumber: BPS Kota Denpasar

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas tercatat bahwa dalam kurun waktu tahun 2019-2021 nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Kota Denpasar mengalami penurunan, yakni dari sebesar 36,15 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi sebesar 32,44 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan perekonomian mengalami kontraksi selama dua tahun berturut-turut, yakni -9,44 persen pada tahun 2020 dan -0,92 persen pada tahun 2021. Namun, dalam dua tahun terakhir perekonomian Kota Denpasar konsisten secara berturut-turut telah mampu tumbuh positif diatas 5 persen.

**Gambar 3.2 PDRB Kota Denpasar ADHK 2010
Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah), 2019-2023**



Sumber: BPS Kota Denpasar

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan 2010. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga atau inflasi yang cenderung meningkat. Sementara pada PDRB atas dasar harga konstan 2010, pengaruh dari harga tersebut telah diabaikan. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan fluktuasi pada masing-masing komponen.

**Gambar 3.3 Perbandingan PDRB Kota Denpasar
ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah),
2019-2023**



Sumber: BPS Kota Denpasar

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Terbentuknya total PDRB menurut pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga NonProfit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Net Ekspor (E) atau nilai ekspor dikurangi nilai impor barang dan jasa.

**Tabel 3.3 Distribusi PDRB Kota Denpasar ADHB
Menurut Pengeluaran (Persen), 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022 [*]	2023 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	46,62	50,82	51,49	51,15	51,09
Konsumsi LNPRT	1,47	1,60	1,65	1,75	1,89
Konsumsi Pemerintah	14,18	16,93	16,17	14,83	13,88
PMTB	34,29	32,33	33,03	32,56	31,72
Perubahan Inventori	0,23	0,19	0,21	0,21	0,07
Net Ekspor	3,20	-1,87	-2,55	-0,51	1,35
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Denpasar

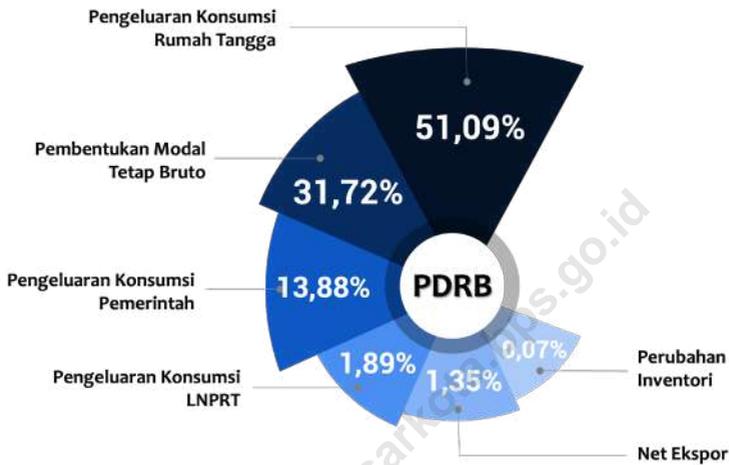
^{*}) Angka Sementara

^{**}) Angka Sangat Sementara

Selama periode 2019-2023, PDRB Denpasar sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), yang berkontribusi sebesar 46 hingga 51 persen. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni berada pada kisaran 31 sampai 34 persen.

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 13 hingga 16 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2019 dan 2023 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih tinggi dari impor. Kecenderungan pada periode tersebut menunjukkan posisi surplus. Pada tahun 2020-2022 komponen impor lebih tinggi dari ekspor, sehingga menunjukkan posisi defisit.

Gambar 3.4 Distribusi PDRB Kota Denpasar ADHB Menurut Pengeluaran (Persen), 2023**



Sumber: BPS Kota Denpasar

**) Angka Sangat Sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator pertumbuhan ekonomi menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4, selama periode tahun 2019-2023 pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar mengalami fluktuasi, yakni sebesar 5,82 persen (2019); -9,44 persen (2020); -0,92 persen (2021); 5,02 persen (2022); dan 5,69 persen (2023). Jika ditelaah menurut komponennya, komponen Konsumsi LNPRT memiliki pertumbuhan positif tertinggi yaitu sebesar 14,73 persen di tahun 2023. Kemudian disusul dengan komponen Konsumsi Rumah Tangga yang telah tumbuh 6,25 persen.

Tabel 3.4 Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2019-2023

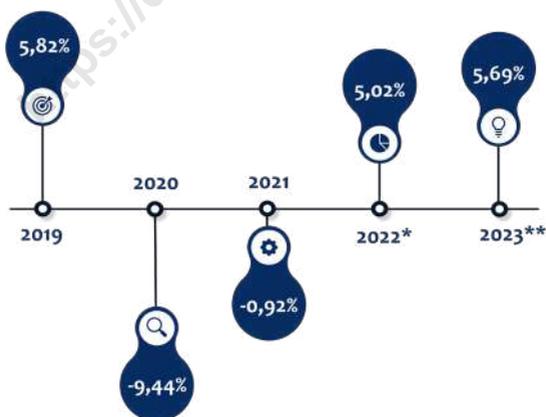
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	6,23	-4,98	0,07	4,47	6,25
Konsumsi LNPR	11,82	-2,86	2,05	10,94	14,73
Konsumsi Pemerintah	14,28	4,55	-3,01	-1,67	-0,36
PMTB	4,34	-16,64	-1,15	2,67	3,58
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	5,82	-9,44	-0,92	5,02	5,69

Sumber: BPS Kota Denpasar

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Gambar 3.5 Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2019-2023



Sumber: BPS Kota Denpasar

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

**Tabel 3.5 Indeks Implisit PDRB Kota Denpasar
Menurut Pengeluaran, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022 [*]	2023 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	143,53	147,30	149,34	156,17	161,49
Konsumsi LNPRT	158,73	159,60	161,47	169,28	175,36
Konsumsi Pemerintah	171,52	175,17	172,87	177,25	183,10
PMTB	138,88	140,50	145,45	153,56	158,89
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	153,39	151,52	153,17	160,37	166,93

Sumber: BPS Kota Denpasar

^{*}) Angka Sementara

^{**}) Angka Sangat Sementara

**Tabel 3.6 Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Kota Denpasar
Menurut Pengeluaran (Persen), 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022 [*]	2023 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	2,46	2,63	1,39	4,58	3,40
Konsumsi LNPRT	2,84	0,55	1,17	4,84	3,59
Konsumsi Pemerintah	0,95	2,13	-1,31	2,53	3,31
PMTB	0,49	1,16	3,53	5,58	3,47
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	2,01	-1,22	1,09	4,71	4,09

Sumber: BPS Kota Denpasar

^{*}) Angka Sementara

^{**}) Angka Sangat Sementara

Indeks implisit PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen akhir (rumah

tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi, maupun ekspor dan impor. Tabel 3.5 menginformasikan tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2019-2023, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen. Pada tahun 2023, pertumbuhan indeks implisit tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT, sedangkan pertumbuhan indeks implisit terendah pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori.

Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kota Denpasar untuk periode 2019-2023 :

3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Denpasar, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Denpasar maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama, dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok bahan makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan, perkakas, dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data pada Tabel 3.7 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2019-2023 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (kecuali tahun 2020), baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan 2010). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama periode 2019-2023 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB berfluktuasi, yaitu 46,62 persen (2019); 50,82 persen (2020); 51,49 persen (2021); 51,15 persen (2022); dan 51,09 persen (2023). Sementara dari sisi pertumbuhan, komponen konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 berhasil tumbuh sebesar 6,25 persen. Pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi sejak pandemi. Sebelumnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berturut-turut sebesar -4,98 persen (2020); 0,07 persen (2021); dan 4,47 persen (2022).

**Tabel 3.7 Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir
Rumah Tangga Kota Denpasar, 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total dan Proporsi Konsumsi Rumah Tangga					
ADHB (Milliar Rupiah)	25.855,85	25.212,94	25.581,39	27.947,56	30.704,58
ADHK 2010 (Milliar Rupiah)	18.014,62	17.116,89	17.129,52	17.895,09	19.013,64
Proporsi terhadap PDRB ADHB (Persen)	46,62	50,82	51,49	51,15	51,09
Rata-rata Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Ribu Rupiah)					
ADHB	26.994,36	34.712,83	34.883,49	37.716,97	41.027,13
ADHK 2010	18.807,86	23.566,30	23.358,28	24.150,53	25.405,82
Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (Persen)					
Total Konsumsi Rumah Tangga	6,23	-4,98	0,07	4,47	6,25
Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	3,21	25,30	-0,88	3,39	5,20
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk					
Jumlah Penduduk*** (Jiwa)	957.824	726.329	733.338	740.981	748.397
Pertumbuhan Penduduk (Persen)	2,92	-24,17	0,96	1,04	1,00

Sumber: BPS Kota Denpasar

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

***) Penduduk 2019 hasil Proyeksi Penduduk SUPAS2015, Penduduk 2020 hasil SP2020, Penduduk 2021-2023 hasil Proyeksi SP2020

Secara rata-rata, konsumsi per kapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun

atas dasar harga konstan 2010 (kecuali tahun 2020-2021). Pada tahun 2019, setiap penduduk di Kota Denpasar menghabiskan dana sekitar 26,99 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atas dasar harga berlaku. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 34,71 juta rupiah (2020); 34,88 juta rupiah (2021); 37,72 juta rupiah (2022), dan 41,03 juta rupiah (2023). Sementara itu, rata-rata konsumsi per kapita atas dasar harga konstan 2010 tumbuh positif dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, rata-rata konsumsi per kapita berhasil tumbuh 3,39 persen setelah sebelumnya terkontraksi 0,88 persen. Kemudian pada tahun 2023, konsumsi per kapita penduduk Kota Denpasar kembali tumbuh lebih tinggi sebesar 5,20 persen.

Tabel 3.8 Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Denpasar (Persen), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan, Minuman, dan Rokok	32,35	35,14	36,12	36,12	35,40
Pakaian	3,20	3,39	3,42	3,38	3,33
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,89	13,58	13,32	13,21	13,03
Kesehatan & Pendidikan	6,53	7,42	7,60	7,45	7,53
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	17,84	15,88	15,65	16,04	16,02
Hotel & Restoran	20,43	17,95	16,95	16,82	17,73
Lainnya	6,75	6,64	6,94	6,98	6,96
Total Konsumsi	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Denpasar

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk masih sedikit meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Peningkatan tersebut berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti pada tabel 3.8:

Tabel 3.9 Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Denpasar (Persen), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan, Minuman, dan Rokok	2,06	2,76	2,88	6,25	4,92
Pakaian dan Alas Kaki	2,87	1,06	-1,15	-0,28	0,06
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,17	0,64	0,87	4,40	2,43
Kesehatan & Pendidikan	5,06	3,62	0,38	1,71	2,70
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,30	-1,49	-0,78	4,87	3,87
Hotel & Restoran	3,08	3,30	0,93	3,17	2,95
Lainnya	1,98	7,35	1,58	6,56	3,87
Total Konsumsi	2,46	2,63	1,39	4,58	3,40

Sumber: BPS Kota Denpasar

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga secara implisit menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya pada masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Rincian peningkatan harga pada total konsumsi rumah tangga masing-masing sebesar

2,46 persen (2019); 2,63 persen (2020); 1,39 persen (2021); 4,58 persen (2022); dan 3,40 persen (2023). Pada kelompok konsumsi makanan, minuman, dan rokok mengalami peningkatan harga sebesar 2,06 persen di tahun 2019, kemudian pada tahun-tahun setelahnya terus mengalami peningkatan hingga mencapai 6,22 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023, laju pertumbuhan implisit melambat menjadi sebesar 4,92 persen.

3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga atau LNPRT merupakan salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 3.10 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir LNPRT Kota Denpasar (Miliar Rupiah), 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT (Milliar Rupiah)					
ADHB	814,21	795,30	821,09	955,06	1.135,02
ADHK 2010	512,97	498,31	508,53	564,18	647,26
Proporsi dan Pertumbuhan Konsumsi LNPRT (Persen)					
Proporsi terhadap PDRB ADHB	1,47	1,60	1,65	1,75	1,89
Pertumbuhan	11,82	-2,86	2,05	10,94	14,73

Sumber: BPS Kota Denpasar

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Apabila dilihat dari sisi kontribusinya terhadap perekonomian Kota Denpasar, konsumsi LNPRT memiliki peranan yang relatif sangat

kecil terhadap perekonomian Kota Denpasar. Hal ini terlihat dari proporsi LNPRT yang hanya berkisar tidak lebih dari 2 persen selama tahun 2019 hingga 2023. Kontribusi konsumsi LNPRT dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat, berturut-turut sebesar 1,47 persen (2019); 1,60 persen (2020); 1,65 persen (2021); 1,75 persen (2022); dan 1,89 persen (2023).

3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang/jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah: a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang/ jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang/jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sementara itu barang/jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri: a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut; b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang/jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang/jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan oleh TNI dan jasa keamanan yang dilakukan oleh kepolisian.

**Tabel 3.11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir
Pemerintah Kota Denpasar, 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
ADHB (Milliar Rupiah)	7.864,04	8.396,25	8.036,77	8.102,76	8.340,08
ADHK 2010 (Milliar Rupiah)	4.584,81	4.793,23	4.649,01	4.571,48	4.554,81
Proporsi terhadap PDRB ADHB (Persen)	14,18	16,93	16,17	14,83	13,88
Konsumsi Pemerintah Per Kapita Per Tahun (Ribu Rupiah)					
ADHB	8.210,32	11.559,85	10.959,17	10.935,17	11.143,93
ADHK 2010	4.786,69	6.599,25	6.339,52	6.169,50	6.086,09
Konsumsi Pemerintah Per Pegawai Pemerintah Per Tahun (Juta Rupiah)					
ADHB	1.398,30	1.500,13	1.535,20	1.651,60	1.832,58
ADHK 2010	815,22	856,39	888,06	931,81	1.000,84
Pertumbuhan (Persen)					
Total Konsumsi Pemerintah	14,28	4,55	-3,01	-1,67	-0,36
Konsumsi Pemerintah Per Kapita	11,04	37,87	-3,94	-2,68	-1,35
Konsumsi Per Pegawai Pemerintah	15,62	5,05	3,70	4,93	7,41
Jumlah Penduduk (Jiwa)	957.824	726.329	733.338	740.981	748.397
Jumlah Pegawai Pemerintah (Jiwa)	5.624	5.597	5.235	4.906	4.551

Sumber: BPS Kota Denpasar

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan penurunan pada tahun 2023. Sementara, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 7,86 triliun rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya berfluktuasi dan pada tahun 2023 nilai menjadi sebesar 8,34 triliun rupiah. Sementara konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2021.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB sedikit mengalami fluktuasi. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB juga berfluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, masing-masing sebesar 14,18 persen (2019); 16,93 persen (2020); 16,17 persen (2021); 14,83 persen (2022); dan 13,88 persen (2023). Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Selama lima tahun terakhir konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga berlaku cenderung meningkat. Konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga berlaku dalam lima tahun terakhir, terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 8,21 juta rupiah dan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 11,56 juta rupiah.

Pada tahun 2020, konsumsi pemerintah per kapita tumbuh signifikan menjadi 6,60 juta rupiah. Namun sejak tahun tersebut, mengalami tren penurunan. Masing-masing sebagai berikut, 6,34

juta rupiah (2021); 6,17 juta rupiah (2022); 6,09 juta rupiah (2023). Hal ini menunjukkan adanya penurunan pengeluaran konsumsi pemerintah per kapita secara kuantitas, dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar -3,94 persen (2021); -2,68 persen (2022); -1,35 persen (2023).

Sementara itu, konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah atas dasar harga berlaku menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Pada tahun 2019 sebesar 1,40 miliar rupiah, kemudian pada tahun berikutnya masing-masing sebesar 1,50 miliar rupiah (2020); 1,54 miliar rupiah (2021); 1,65 miliar rupiah (2022), dan 1,83 miliar rupiah (2023).

Pada tingkat harga konstan, indikator yang menunjukkan pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, masing-masing sebesar 815,22 juta rupiah (2019); 856,39 juta rupiah (2020); 888,06 juta rupiah (2021); 931,81 juta rupiah (2022); dan 1,00 miliar rupiah (2023). Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 berfluktuasi namun cenderung meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah pegawai pemerintah yang cenderung menurun setiap tahun. Pada tahun 2023, jumlah pegawai pemerintah Kota Denpasar berada pada level terendah dalam lima tahun terakhir yaitu sebanyak 4.551 pegawai.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan penurunan secara keseluruhan dan per kapita, namun mengalami peningkatan pada pegawai pemerintah. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah.

Pertumbuhan tertinggi total konsumsi pemerintah terjadi pada tahun 2019 sebesar 14,28 persen, sedangkan untuk pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 37,87 persen. Sementara untuk pertumbuhan konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 15,62 persen.

3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan mengenai bagian dari pendapatan yang direalisasikan menjadi investasi fisik. Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (*capital*). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari produk impor.

Tabel 3.12 Perkembangan PMTB Kota Denpasar, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai PMTB (Milliar Rupiah)					
ADHB	19.017,84	16.037,90	16.412,76	17.789,85	19.066,39
ADHK	13.693,56	11.415,16	11.283,95	11.584,84	11.999,41
Proporsi dan Pertumbuhan PMTB (Persen)					
Proporsi terhadap PDRB ADHB	34,29	32,33	33,03	32,56	31,72
Pertumbuhan	4,34	-16,64	-1,15	2,67	3,58

Sumber: BPS Kota Denpasar

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Selama kurun waktu 2019-2023, terlihat bahwa nilai PMTB mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2019, pengeluaran PMTB atas dasar harga berlaku mencapai 19,02 triliun rupiah, kemudian berfluktuasi dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 19,07 triliun rupiah. Demikian halnya dengan pengeluaran PMTB atas dasar harga konstan 2010, yang

juga mengalami fluktuasi pada masing-masing tahun. Sementara kontribusi PMTB terhadap total PDRB Denpasar berada pada kisaran 32,33 persen hingga 34,29 persen.

Data pada Tabel 3.12 menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2022, PMTB mampu tumbuh 2,67 persen setelah mengalami penurunan sejak tahun 2020. Kemudian kembali tumbuh positif sebesar 3,58 persen pada tahun 2023.

3.2.5 Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi, maupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud dalam hal ini bisa berarti terjadi penambahan (bertanda positif) dan atau terjadi pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Secara umum komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2019 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 129,73 miliar rupiah, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 92,43 miliar rupiah. Perubahan inventori sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022. Namun, kembali mengalami penurunan menjadi 40,10 miliar rupiah pada tahun 2023.

Tabel 3.13 Perkembangan Perubahan Inventori Kota Denpasar, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Perubahan Inventori (Milliar Rupiah)					
ADHB	129,73	92,43	103,97	114,64	40,10
ADHK 2010	51,03	43,25	55,94	59,73	20,48
Proporsi Nilai Perubahan Inventori (Persen)					
Proporsi terhadap PDRB ADHB	0,23	0,19	0,21	0,21	0,07

Sumber: BPS Kota Denpasar

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB Kota Denpasar mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2019, proporsi perubahan inventori adalah 0,23 persen, selanjutnya masing-masing sebesar 0,19 persen (2020); 0,21 persen (2021); 0,21 persen (2022); dan 0,07 persen (2023).

3.2.6 Net Ekspor Antar Daerah

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar

daerahnya, demikian pula sebaliknya.

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Denpasar tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi maupun provinsi lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kota Denpasar. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB ekspor dengan nilai impornya.

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Denpasar di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kota Denpasar terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

Secara total, dalam kurun waktu 2019-2023 nilai net ekspor antar daerah atas dasar harga berlaku menunjukkan tren yang berfluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2019, nilai net ekspor antar daerah sebesar 1,77 triliun rupiah kemudian turun ke level negatif selama tiga tahun dari 2020 hingga 2022. Net ekspor antar daerah tahun 2023 kembali

ke level positif atau nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor yang mencapai 814,13 miliar rupiah.

**Tabel 3.14 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah
Kota Denpasar, 2019-2023**

Uraian (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022* (5)	2023** (6)
Total Nilai Net Ekspor (Miliar Rupiah)					
ADHB	1.774,38	-927,35	-1.269,36	-276,03	814,13
ADHK 2010	-702,56	-1.126,61	-1.187,34	-608,60	-231,30
Proporsi Nilai Net Ekspor (Persen)					
Proporsi terhadap PDRB ADHB	3,20	-1,87	-2,55	-0,51	1,35

Sumber: BPS Kota Denpasar

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sejalan dengan nilai net ekspor antar daerah atas dasar harga berlaku, nilai net ekspor antar daerah atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung berfluktuasi dengan nilai riil sebesar -702,56 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi sebesar -231,30 milliar rupiah pada tahun 2023. Sementara itu, proporsi net ekspor antar daerah terhadap PDRB pada periode 2019 hingga 2023 berkisar di bawah lima persen. Proporsi net ekspor antar daerah berturut-turut sebesar 3,20 persen (2019); -1,87 persen (2020); -2,55 persen (2021); -0,51 persen (2022); dan 1,35 persen (2023).

<https://denpasarkota.bps.go.id>



4

Perkembangan Agregat PDRB Kota Denpasar Menurut Pengeluaran

4 Perkembangan Agregat PDRB Kota Denpasar

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB Nominal

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kota Denpasar, namun di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah (produksi), pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB per kapita. Dalam kurun waktu tahun 2019-2023, PDRB per kapita Kota Denpasar menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Denpasar rata-rata mampu menciptakan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

**Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita
Kota Denpasar, 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai dan Pertumbuhan PDRB (Milliar Rupiah)					
ADHB (Milliar Rupiah)	55.456,04	49.607,46	49.686,63	54.633,83	60.100,30
ADHK 2010 (Milliar Rupiah)	36.154,42	32.740,22	32.439,61	34.066,71	36.004,30
Pertumbuhan PDRB (Persen)	5,82	-9,44	-0,92	5,02	5,69
Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita					
ADHB (Ribu Rupiah)	57.897,95	68.298,89	67.754,06	73.731,75	80.305,37
ADHK 2010 (Ribu Rupiah)	37.746,41	45.076,30	44.235,54	45.975,15	48.108,56
Pertumbuhan PDRB Per Kapita (Persen)	2,81	19,42	-1,87	3,93	4,64
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	957.824	726.329	733.338	740.981	748.397
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	2,92	-24,17	0,96	1,04	1,00

Sumber: BPS Kota Denpasar

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Selama kurun waktu tahun 2019-2023, pertumbuhan PDRB per kapita secara riil cenderung berfluktuatif. Di sisi lain, perkembangan ekonomi yang terjadi diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk yang pertumbuhannya juga berfluktuatif setiap tahun, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB per

kapita.

4.2 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.2 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kota Denpasar, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rupiah)					
Rumah Tangga	25.855,85	25.212,94	25.581,39	27.947,56	30.704,58
LNPRT	814,21	795,30	821,09	955,06	1.135,02
Pemerintah	7.864,04	8.396,25	8.036,77	8.102,76	8.340,08
Total Konsumsi Akhir	34.534,10	34.404,49	34.439,26	37.005,37	40.179,69
PDRB (ADHB) (Miliar Rupiah)	55.456,04	49.607,46	49.686,63	54.633,83	60.100,30
Proporsi terhadap PDRB (Persen)	62,27	69,35	69,31	67,73	66,85

Sumber: BPS Kota Denpasar

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah Denpasar digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir.

Hal ini tercermin dari proporsi permintaan akhir yang berada pada kisaran 62,27 persen hingga 69,35 persen. Jika diperhatikan selama lima tahun terakhir, proporsi konsumsi akhir cenderung berfluktuasi, masing-masing sebesar 62,27 persen (2019); 69,35 persen (2020); 69,31 persen (2021); 67,73 persen (2022); dan 66,85 persen (2023). Proporsi konsumsi akhir sejalan dengan nilai nominal konsumsi akhir yang juga cenderung berfluktuasi setiap tahun, dengan kata lain laju peningkatan PDRB secara keseluruhan cenderung lebih rendah dibandingkan konsumsi akhir.

4.3 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (Pembentukan Modal Tetap Bruto). Sekilas tampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kota Denpasar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa rasio konsumsi akhir rumah tangga terhadap PMTB cenderung meningkat. Pada tahun 2019, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB adalah sebesar 1,36, kemudian mulai berfluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Tercatat rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB pada tahun 2020 hingga 2023 masing-masing sebesar 1,57; 1,56; 1,57; dan 1,61. Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi akhir rumah tangga lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan nilai investasi.

Tabel 4.3 Rasio Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB Kota Denpasar, 2019-2023

Uraian (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022* (5)	2023** (6)
Total Konsumsi Rumah Tangga ADHB (Miliar Rupiah)	25.855,85	25.212,94	25.581,39	27.947,56	30.704,58
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rupiah)	19.017,84	16.037,90	16.412,76	17.789,85	19.066,39
Rasio Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	1,36	1,57	1,56	1,57	1,61

Sumber: BPS Kota Denpasar

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

4.4 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sementara output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter nilai tambah.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap penambahan satu unit nilai output (keluaran) maka akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Penghitungan ICOR menggunakan formula

sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 4.4 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Denpasar, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	36.154,42	32.740,22	32.439,61	34.066,71	36.004,30
Perubahan (Miliar Rupiah)	1.988,38	-3.414,19	-300,62	1.627,10	1.937,59
PMTB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	13.693,56	11.415,16	11.283,95	11.584,84	11.999,41
ICOR	6,89	NA	NA	7,12	6,19

Sumber: BPS Kota Denpasar

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Selama periode tahun 2019-2023, besaran ICOR relatif stabil pada kisaran nilai 6 hingga 7 dengan mengalami sedikit fluktuasi (kecuali tahun 2020-2022 tidak tersedia). Hal ini berarti setiap penambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak 6 hingga 7 unit. ICOR Kota Denpasar masing-masing tercatat pada tahun 2019 adalah sebesar 6,89 kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 7,12. Namun, pada tahun 2023 ICOR mengalami penurunan menjadi sebesar 6,19.



Lampiran

**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
(Juta Rupiah), 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022[]]	2023^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	25.855.845,93	25.212.938,50	25.581.389,87	27.947.555,10	30.704.584,51
Konsumsi LNPRT	814.211,04	795.296,48	821.092,73	955.055,37	1.135.018,72
Konsumsi Pemerintah	7.864.038,22	8.396.252,20	8.036.774,04	8.102.755,02	8.340.083,46
PMTB	19.017.842,31	16.037.899,49	16.412.764,87	17.789.851,05	19.066.386,23
Perubahan Inventori	129.729,27	92.427,28	103.969,93	114.636,29	40.100,81
Net Ekspor	1.774.377,29	-927.352,10	-1.269.364,55	-276.025,63	814.127,92
PDRB	55.456.044,06	49.607.461,84	49.686.626,87	54.633.827,19	60.100.301,66

Sumber: BPS Kota Denpasar

] Angka Sementara

**] Angka Sangat Sementara

**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
(Juta Rupiah), 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	18.014.615,04	17.116.885,59	17.129.515,71	17.895.087,56	19.013.636,97
Konsumsi LNPRT	512.967,16	498.311,58	508.526,58	564.178,08	647.262,65
Konsumsi Pemerintah	4.584.805,93	4.793.229,42	4.649.012,31	4.571.481,91	4.554.811,65
PMTB	13.693.561,17	11.415.158,10	11.283.948,09	11.584.836,59	11.999.413,55
Perubahan Inventori	51.025,00	43.245,12	55.938,27	59.725,14	20.481,77
Net Ekspor	-702.557,27	-1.126.605,64	-1.187.335,08	-608.599,08	-231.304,64
PDRB	36.154.417,02	32.740.224,18	32.439.605,88	34.066.710,20	36.004.301,95

Sumber: BPS Kota Denpasar

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

**Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional
Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Persen), 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	46,62	50,82	51,49	51,15	51,09
Konsumsi LNPRT	1,47	1,60	1,65	1,75	1,89
Konsumsi Pemerintah	14,18	16,93	16,17	14,83	13,88
PMTB	34,29	32,33	33,03	32,56	31,72
Perubahan Inventori	0,23	0,19	0,21	0,21	0,07
Net Ekspor	3,20	-1,87	-2,55	-0,51	1,35
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Denpasar

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

**Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kota Denpasar Atas Dasar Konstan Menurut
Pengeluaran (Persen), 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022[*]	2023^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	6,23	-4,98	0,07	4,47	6,25
Konsumsi LNPRT	11,82	-2,86	2,05	10,94	14,73
Konsumsi Pemerintah	14,28	4,55	-3,01	-1,67	-0,36
PMTB	4,34	-16,64	-1,15	2,67	3,58
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	5,82	-9,44	-0,92	5,02	5,69

Sumber: BPS Kota Denpasar

^{*}) Angka Sementara

^{**}) Angka Sangat Sementara

**Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional
Bruto Kota Denpasar (2010=100) Menurut
Pengeluaran, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	143,53	147,30	149,34	156,17	161,49
Konsumsi LNPRT	158,73	159,60	161,47	169,28	175,36
Konsumsi Pemerintah	171,52	175,17	172,87	177,25	183,10
PMTB	138,88	140,50	145,45	153,56	158,89
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	153,39	151,52	153,17	160,37	166,93

Sumber: BPS Kota Denpasar

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

**Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk
Domestik Regional Bruto Kota Denpasar (2010=100)
Menurut Pengeluaran (Persen), 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	2,46	2,63	1,39	4,58	3,40
Konsumsi LNPRT	2,84	0,55	1,17	4,84	3,59
Konsumsi Pemerintah	0,95	2,13	-1,31	2,53	3,31
PMTB	0,49	1,16	3,53	5,58	3,47
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	2,01	-1,22	1,09	4,71	4,09

Sumber: BPS Kota Denpasar

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DENPASAR***

Jalan Mulawarman No. 11, Denpasar 80111

Telp. (0361) 418770, Fax (0361) 434326

Email: bps5171@bps.go.id

Homepage: denpasarkota.bps.go.id